

ABSTRAK

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat serta meningkatnya pembangunan di negara kita mengakibatkan kebutuhan akan tanah dirasakan semakin meningkat dan mendesak, sedangkan persediaan tanah semakin lama semakin sempit dan sulit untuk dimiliki, maka tidak mustahil apabila harga tanah dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu dapat menimbulkan berbagai sengketa tanah diantaranya munculnya kasus sertifikat ganda . Undang-Undang Pokok Agraria meletakkan dasar untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang ditindak yang di tindak lanjuti dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tujuan Pendaftaran Tanah. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kaitan erat dengan pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. adapun tujuan penelitian ini adalah ,satu untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya sertifikat tanah ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, dua untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam hal terdapat sertifikat tanah ganda, tiga untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sertifikat tanah ganda di Kabupaten Cilacap.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Jenis dan sumber data yaitu data primer merupakan data yang di dapat dari lapangan. data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan interview (wawancara) ,studi pustaka, studi dokumen .Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. Dengan perumusan masalah, satu bagaimana penyebab terjadinya sertifikat tanah ganda di kantor pertanahan kabupaten cilacap, dua bagaimana tanggung jawab kantor pertanahan kabupaten cilacap dalam hal terdapat sertifikat tanah ganda , tiga apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dan solusi tanggung jawab kantor pertanahan dalam penyelesaian sertifikat tanah ganda di kabupaten cilacap.

Kata Kunci : Analisis Yuridis , Tanggung Jawab , BPN , Sertifikat Ganda

Abstract

The rapid population growth and increasing development in our country have resulted in the need for land being felt to be increasing and urgent, while the land supply is increasingly narrow and difficult to own, it is not impossible if the price of land increases from time to time. The imbalance between the supply of land and the need for land can lead to various land disputes, including the emergence of cases of double certificates. The Basic Agrarian Law lays the foundation for realizing legal certainty and legal protection for all Indonesian people. According to Article 19 of the UUPA Number 5 of 1960 which was followed up with Article 3 letter a of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning the Purpose of Land Registration. In Indonesia, the institution that has a close relationship with land is the National Land Agency or BPN which has the task of carrying out government duties in the land sector in accordance with the provisions of the legislation. Cilacap Regency Land Affairs, two to find out and analyze the responsibilities of the Cilacap Regency Land Office in the case of dual land certificates, three to identify and analyze the obstacles and solutions of the Land Office's responsibilities in completing dual land certificates in Cilacap Regency.

Method The approach used in this research is empirical juridical, namely analyzing the problem by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field. The research specifications in this study are descriptive analytical, which is intended to provide data as accurate as possible about a condition or other symptoms. Types and sources of data, namely primary data is data obtained from the field. secondary data, namely data obtained from or derived from library materials, data collection techniques with interviews (interviews), literature studies, document studies. Then the author analyzes qualitatively which is then presented descriptively. With the formulation of the problem, one is how the causes of dual land certificates occur at the Cilacap district land office, two how the responsibility of the Cilacap district land office is in the case of multiple land certificates, three what are the obstacles and solutions to the responsibility of the land office in completing land certificate double in Cilacap Regency.

Keywords: Juridical Analysis, Responsibility, BPN, Dual Certificate